

## Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis

Martinus Sony Erstiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dinamika Surabaya

Koresponden Penulis: Email: martinus@dinamika.ac.id

---

### *ABSTRACT*

This research identifies various technical, social, and economic problems faced by Coretax application users in the modernization of Indonesia's tax system that began in early January 2025, which led to public dissatisfaction. The novelty of this research lies in the content analysis of public comments on the Cortax application from YouTube videos and online news. The Content Analysis method is used to analyze user problems, the impact of the application on tax compliance, and provide recommendations for improving the digital taxation system. The results show that there are technical problems such as errors, server down, slow, login failure, which affect tax administration. In conclusion, the Coretax application still does not meet expectations, disrupts business, and lowers public trust in the government. Future research is recommended to focus on improving technical infrastructure, socialization, and budget transparency.

**Keywords** : Content Analysis; Coretax; Modernization; Taxation System; Transparency

### *ABSTRAK*

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah teknis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi pengguna aplikasi Coretax dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia yang dimulai pada awal Januari 2025, yang menimbulkan ketidakpuasan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konten komentar publik terhadap aplikasi Cortax dari video YouTube dan berita daring. Metode Content Analysis digunakan untuk menganalisis masalah pengguna, dampak aplikasi pada kepatuhan pajak, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem perpajakan digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya masalah teknis seperti error, server down, lambat, gagal login, yang mempengaruhi administrasi perpajakan. Kesimpulannya, aplikasi Coretax masih belum memenuhi harapan, mengganggu bisnis, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian mendatang disarankan untuk fokus pada perbaikan infrastruktur teknis, sosialisasi, dan transparansi anggaran.

**Kata Kunci** : Content Analysis (Analisis ISI); Coretax; Modernisasi; Sistem Perpajakan; Transparansi

---

## PENDAHULUAN

Era globalisasi yang semakin berkembang, setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan sebagai keterangan. Kalimat ini menyoroti imperatif adaptasi teknologi bagi seluruh negara, dengan Indonesia sebagai salah satu contohnya, dalam konteks sistem administrasi perpajakan di tengah arus globalisasi yang kian pesat. Modernisasi perpajakan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh negara (Hilmar & Sachweh, 2022) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak (Baker & Murphy, 2020a). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meluncurkan aplikasi perpajakan berbasis teknologi informasi, yaitu Coretax yang diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta mempercepat pendapatan atas pajak untuk mendukung pembangunan nasional (Amberger & Kohlhase, 2023).

Implementasi aplikasi Coretax yang dimulai pada tahun 2025, diikuti dengan anggaran yang fantastis mencapai Rp 1,2 Triliun. Kemudian terdapat berbagai tantangan menjadi objek yang dikenai tindakan tersebut. Dalam kalimat ini, tidak terdapat unsur keterangan yang secara eksplisit menjelaskan waktu, tempat, atau cara terjadinya tantangan tersebut. Meski bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan melalui digitalisasi, aplikasi ini justru menghadapi berbagai

masalah teknis dan sosial yang merugikan para wajib pajak, baik pengusaha besar maupun kecil (Wu, 2022). Komentarkomentar yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa Coretax tidak mampu memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Banyak pengguna, terutama dari kalangan pengusaha kecil dan menengah (UMKM), mengeluhkan kesulitan dalam mengakses aplikasi, kesalahan sistem yang sering terjadi, serta server yang tidak mampu menangani jumlah pengguna yang besar (Robiatul Muvidah & Andriani, 2022).

Terdapat masalah utama yang dihadapi oleh para wajib pajak. Kemudian, kesulitan dalam membuat faktur pajak dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), yang seharusnya menjadi bagian dari proses agar lebih mudah dan otomatis, yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai masalah utama tersebut. Para pengguna sering menghadapi sistem yang *error*, pencatatan faktur yang tidak tersimpan dengan baik, bahkan ketidakmampuan untuk mengakses aplikasi sama sekali. Hal ini memperburuk citra pemerintah yang seharusnya mempermudah sistem perpajakan, namun justru menambah beban bagi para wajib pajak yang sudah terbebani dengan kewajiban membayar pajak (Farras Mufidah & Anisaul Hasanah, 2023).

Proyek Coretax didanai dengan anggaran yang sangat besar, hasil yang diperoleh jauh dari harapan. Para pengguna merasa bahwa aplikasi ini belum memberikan solusi yang diinginkan,

melainkan justru menciptakan hambatan tambahan. Bahkan, pengguna mengkritik bahwa aplikasi ini seolah dikerjakan secara terburu-buru tanpa melalui uji coba yang matang, yang berisiko mengganggu kelancaran bisnis dan alur kas pengusaha. Kecemasan tentang penyalahgunaan anggaran dan potensi korupsi dalam pengadaan aplikasi ini juga semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap proyek pemerintah yang seharusnya lebih transparan dan efisien.

Penggunaan teknologi untuk mengelola perpajakan di Indonesia tidak hanya terkait dengan permasalahan teknis dalam implementasi aplikasi (Annisah & Susanti, 2021), tetapi juga menyangkut persepsi publik terhadap keandalan dan integritas sistem perpajakan itu sendiri (Rahmayanti & Merkusiwati, 2023). Berbagai masalah teknis ini menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola sistem perpajakan yang efisien dan akuntabel. Hal ini diperburuk dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan Coretax (Nabila et al., 2024), yang menyebabkan banyak wajib pajak merasa kesulitan dan bingung dalam menggunakan aplikasi tersebut. Akibatnya, pemerintah malah menghadapi tantangan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tengah ketidakpuasan yang berkembang di masyarakat (Hajering, 2024; Rizal et al., 2024).

Sistem pajak di Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali dengan memperkenalkan berbagai aplikasi baru untuk menggantikan sistem lama, namun seringkali transisi ini dilakukan

secara terburu-buru dan tidak disertai dengan persiapan yang matang (Wala & Tesalonika, 2024). Hal ini mengarah pada ketidakstabilan dalam sistem dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi kebijakan pemerintah. Masyarakat, terutama pelaku usaha, cenderung merasakan ketidaknyamanan saat diminta untuk mengikuti sistem yang berubah-ubah, terutama ketika aplikasi yang baru tidak dapat memenuhi harapan dan sering kali menghadirkan masalah teknis (Ningsih et al., 2024).

Penelitian mengenai implementasi aplikasi Coretax sebagai bagian dari upaya modernisasi perpajakan Indonesia sangat penting untuk dilakukan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh keberhasilan atau kegagalan implementasi sistem ini terhadap kepercayaan publik, kepatuhan pajak, serta kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan (Wala & Tesalonika, 2024). Urgensi penelitian untuk mengurai dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital ini. Penting untuk menganalisis sejauh mana aplikasi Coretax benar-benar mampu memperbaiki sistem perpajakan, serta untuk mengevaluasi kesalahan teknis dan kesalahan manajerial yang dapat memperburuk proses digitalisasi perpajakan.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak sosial dari kebijakan digitalisasi perpajakan, serta memperlihatkan

kekurangan dan kelemahan sistem yang ada. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas implementasi aplikasi Coretax. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan teknis dan sosial yang dihadapi oleh wajib pajak, mengevaluasi dampak aplikasi Coretax terhadap tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, serta dampaknya terhadap kinerja ekonomi nasional. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem Coretax, baik dalam hal infrastruktur teknis, penyederhanaan antarmuka pengguna, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Menilai efektivitas kebijakan digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan efisiensi sistem pajak di Indonesia serta mengurangi kebocoran pajak.

Penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan dalam memberikan wawasan baru tentang implementasi sistem Coretax dalam perspektif pengguna, dengan menggali keluhan dan persepsi masyarakat melalui analisis konten komentar publik. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi aplikasi Coretax, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan pajak, serta menyajikan perspektif masyarakat dan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan berbasis teknologi. Mendorong penerapan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, serta lebih tersebar luas di masyarakat agar

transisi menuju sistem perpajakan digital dapat berjalan lebih lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat (Rizal et al., 2024).

## METODE PENELITIAN

Metode analisis *content* Isi (analisis ISI) termasuk metode penelitian kualitatif yang tersistematis dan obyektif untuk menggambarkan isi dari komunikasi dalam bentuk video dan teks (Elmortada et al., 2020; Spiegel et al., 1955). Metode ini menganalisis data dari komentar yang berasal dari video youtube dan teks dari media massa *online* (Na et al., 2023). Tujuan menggunakan analisis ISI untuk mengurai dinamika dari berbagai respon terhadap aplikasi Coretax, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif atas kebijakan pemerintah terkait dengan teknologi digital perpajakan.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dan fokus pada video berita youtube, laporan investigasi, ulasan teknologi perpajakan, diskusi publik atau konten lainnya yang relevan dengan komentar yang nampak pada youtube dan merupakan opini atau tanggapan masyarakat terhadap penerapan aplikasi Coretax yang juga berdampak pada proses perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak. Pada media massa online peneliti mengidentifikasi artikel berita, opini atau laporan dari berbagai portal termasuk dari kompas.com, detik.com, CNN Indonesia, Kontan, dll dengan kata kunci yang digunakan yaitu Coretax 2025, Coretax *Error*, Aplikasi pajak baru Error, Implementasi Coretax DJP, Keluhan Coretax menggunakan *search engine youtube*.

Pengumpulan data, data yang dikumpulkan difokuskan pada youtube dan media massa online. Data yang dikumpulkan relevan dengan video youtube pada bulan Januari – Maret 2025, dengan komentar yang relevan dengan topik, deskripsi dan jumlah komentar yang berkaitan dengan topik Coretax. Ekstrasi komentar berdasarkan video yang terpilih dengan proses manual (*Copy Paste*) mencakup teks komentar lengkap, terdapat username komentar, tanggal/waktu komentar, URL video berdasarkan topik yang selaras dengan penelitian ini. Pengumpulan data dari media massa online berdasarkan judul dan isi yang secara substansial membahas implementasi Coretax, masalah teknis, dampak sosial, anggaran atau kebijakan perpajakan. Ekstrasi data teks berupa teks lengkap, judul artikel, nama media sumber, tanggal publikasi, dan URL berita.

Pengkategorian dan kodefikasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana masyarakat menerima aplikasi Coretax

apakah aplikasi ini diterima atau dipersepsikan sebagai kemajuan dalam sistem perpajakan digital di Indonesia. Mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi pengguna termasuk kesalahan teknis, ketidakstabilan aplikasi (*downtime*) atau kesulitan dalam menggunakan fitur aplikasi. Selanjutnya menilai penerapan Coretax mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap transparansi dan integritas pemerintah dalam mengelola perpajakan. Melakukan analisis tentang apakah aplikasi ini mempermudah atau menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama bagi pelaku usaha, wajib pajak orang pribadi dan badan usaha. Memberikan saran masukan dari masyarakat setempat terkait perbaikan atau perubahan yang diperlukan pada aplikasi Coretax. Kodefikasi berupa teks sebagai alat analisis yang relevan dengan kategori. Kodefikasi terurai menjadi dua bagian berupa kode positif dan kode negatif.

**Tabel. 1. Kategori dan Kodefikasi**

No	Kategori	Kodefikasi
1	Masalah Teknis dan Performa Sistem	<i>Error, Bug</i> , Lambat, server down, loading, kegagalan fungsi teknis Coretax ( <i>Server Down</i> )
2	Masalah Akses dan Login	Gagal Login, Masalah OTP, Lupa Password, Kendala akses lain.
3	Kesulitan dalam Penggunaan (Useability) & Kerumitan	Ribet, Susah, bingung, UI Jelek, Tidak Efisien, Buang Waktu
4	Kritik Terhadap Implementasi & Kesiapan Sistem	Belum Siap, Dipaksakan, Kurang Sosialisasi, Terburu-buru
5	Kritik terhadap pemerintah, kebijakan dan isu korupsi	Korupsi, Tidak Percaya, Pemerintah Gagal, Kebijakan merugikan, anggaran tidak jelas, tidak transparan
6	Dampak Negatif bagi wajib pajak	Merugikan WP, Potensi Denda sistem coretax sering error, Beban Tambahan upgrade komputer/alat pendukung, Pelaku usaha sulit
7	Perbandingan dengan sistem sebelumnya	E-faktur lebih simple, menyatakan sistem lama lebih baik
8	Isu Biaya dan Anggaran Proyek	Biaya Trilyunan, Anggaran besar
9	Ekspresi Emosi Negatif	Marah, Kecewa, Stress, Capek, Frustrasi
10	Saran, Tututan & Harapan	Saran Perbaikan, Tunda, Perbaiki Segera, Harapan, Petisi
11	Ketidakjelasan & Pencarian Informasi	Cara menggunakan, kladifikasi error, Informasi lebih lanjut.

Struktur tersebut memberikan kerangka kerja untuk mengurai dan

mengidentifikasi berbagai aspek keluhan dan opini yang mengekspresikan komentar

youtube dan media online secara sistematis.

Pengelolaan data digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel* yang dapat menghasilkan diagram *treemap*, *barchart*, *histogram* dan lainnya untuk mengungkap penelitian ini. Selain itu *Voyant analysis* dan *MAXQDA Analysis* untuk mengetahui *wordclouds generation*, *trends* dan *contextual Analysis*. Proses validasi temuan dilakukan untuk memastikan hasil yang diperoleh akurat dan representatif. Validasi ini dilakukan melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari komentar-komentar di youtube dan artikel berita di media massa online. Selain itu, *cross-checking* dilakukan dengan melibatkan pakar atau pihak terkait dalam bidang perpajakan dan teknologi informasi untuk memverifikasi interpretasi data. Member *checking* juga diterapkan dengan meminta *feedback* langsung dari para pengguna atau peserta yang berkomentar untuk memastikan bahwa analisis dan interpretasi temuan sesuai dengan pandangan mereka. Interpretasi temuan digunakan untuk membandingkan hasil analisis dari berbagai kategori yang telah dikodekan serta merujuk pada temuan dari literatur atau penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang memberikan gambaran pentingnya reaksi publik terhadap *Coretax* yang sedang diterapkan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia, memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai ketidakpuasan publik terhadap *Coretax*.

Dari video yang dikumpulkan jumlah keseluruhan *views* mencapai 391.303, jumlah *comment* mencapai 3.188 dan jumlah like berjumlah 3.716. Hasil yang menunjukkan terurai berikut dibawah ini menunjukkan kesenjangan antara tujuan modernisasi perpajakan dan kenyataan yang dialami oleh pengguna, serta memberikan wawasan tentang area-area yang perlu diperbaiki dalam implementasi sistem ini untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan di Indonesia.

Aplikasi yang baru diluncurkan bulan Januari tahun 2025 tidak berjalan mulus dan masih belum sesuai harapan dimana masih ada kritik terhadap aplikasi *Coretax*. Pada Tabel 2 menjelaskan bahwa kritik terhadap kesalahan teknis dan ketidakstabilan aplikasi diungkap pada video “CNBC dengan topik *Coretax Error*, *Coretax* banyak diprotes, DPR Desak DJP Benahi Sistem”, menggambarkan sistem ini belum siap untuk diimplementasikan secara luas. Dan menunjukkan keluhan masyarakat terkait teknis dan kegagalan yang sering terjadi termasuk *error*, *bug*, dan *server down*.

Dampak negatif atas berbagai keluhan masyarakat baik pengusaha besar dan kecil, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dengan adanya aplikasi *Coretax* yang telah menghabiskan anggaran hingga Rp. 1.2 Trilyun hasilnya masyarakat kesulitan mengakses aplikasi dan ketidakmampuan sistem dalam menyelesaikan tugas administratif yaitu faktur pajak dan lainnya.

**Tabel. 2. Video Youtube tentang Coretax**

No	Channel	Topik Youtube	Tgl. Publikasi & Tahun	Link	Subscribe	Durasi
1	CNBC Indonesia	Coretax Error, DPR Desak DJP Benahi Sistem	14-Januari 2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=DOY EeBEXd8">https://www.youtube.com/watch?v=DOY EeBEXd8</a>	2,8M	09:14
2	CNBC Indonesia	Coretax banyak diprotes, sistem belum siap?	15-januari-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=AOHpqFo9DQ&amp;t=12s">https://www.youtube.com/watch?v=AOHpqFo9DQ&amp;t=12s</a>	2.8M	06:24
3	CNBC Indonesia	Coretax Jalan Ninja Dongkrak Penerimaan Negara	15-Januari-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=z0UreqP6Kgo">https://www.youtube.com/watch?v=z0UreqP6Kgo</a>	2.8M	11:41
4	Indo Pajak	Update!! Review Keresahan #Coretax #DJP di Februari 2025	20-Februari-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JyZFkHpf29U">https://www.youtube.com/watch?v=JyZFkHpf29U</a>	1.52K	15:03
5	Info Pajak	UPDATE!!! Review Keresahan #Coretax #DJP di Februari 2025	20-Februari-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JyZFkHpf29U&amp;t=3s">https://www.youtube.com/watch?v=JyZFkHpf29U&amp;t=3s</a>	1.62K	15:06
6	Celebrity Word	Habiskan Anggaran Hingga Rp1,2 Triliun, Sistem Coretax Panen Kritik dan Hujatan	29-Maret-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=msewEsGCoBo">https://www.youtube.com/watch?v=msewEsGCoBo</a>	11.4K	02:29
7	Hukum Online	Coretax tidak siap : Inovasi atau Masalah Baru	30-Januari-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Qk2-uNk7A">https://www.youtube.com/watch?v=Qk2-uNk7A</a>	15.6K	13:38
8	Info Pajak	Cara Login Coretax Pertama Kali   Cara Daftar Coretax   Cara Masuk ke Aplikasi Coretax	31-Desember-2024	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=K7adILv2AI">https://www.youtube.com/watch?v=K7adILv2AI</a>	31.3K	04:43
9	MetroTV	Reformasi Perpajakan, Core tax System Baru Berlaku di 2024	31-oktober 2023	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GMuVmp5VLV4">https://www.youtube.com/watch?v=GMuVmp5VLV4</a>	10.2 M	02:08
10	JAGUAR Indonesia	Pasti Berhasil !!! Cara Mengatasi Gagal Login di Aplikasi Coretax Terbaru	13-Januari-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BR e5ErUd8aI">https://www.youtube.com/watch?v=BR e5ErUd8aI</a>	1.8K	3.34
11	David Alfa Nurnana	Review Coretax Indonesia VS IRAS Singapura	5-Februari-2025	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cIZqTC3I1Ds">https://www.youtube.com/watch?v=cIZqTC3I1Ds</a>	352K	13:27

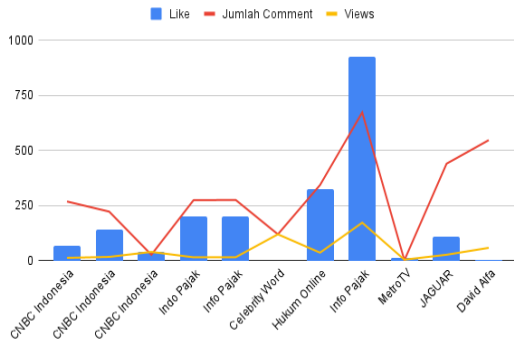
Terdapat masalah akses dan kesulitan penggunaan aplikasi terjadi gagal login atau masalah OTP. Dari kondisi tersebut membawa frustrasi bagi kalangan wajib pajak badan yang wajib membuat faktur pajak sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Penerapan Cortax terasa, dipaksakan, tanpa adanya persiapan yang matang. Kritik lain menganggap tidak melakukan sosialisasi dengan baik dan terdapat kesan yang terburu-buru dalam peluncuran sistem.

Proyek ini menghabiskan anggaran yang besar, hasilnya tidak sesuai harapan dan banyak pengguna merasa terbebani oleh sistem karena sulit digunakan. Selanjutnya terdapat ketidakpuasan publik terhadap aplikasi Coretax dan memberikan gambaran tentang area yang perlu diperbaiki agar tujuan modernisasi perpajakan dapat tercapai.

Grafik 1, menunjukkan tiga data yang terpisah: jumlah "Like" yang ditunjukkan dengan batang berwarna biru, "Jumlah Comment" yang ditunjukkan

dengan garis merah, dan "Views" yang ditunjukkan dengan garis kuning.

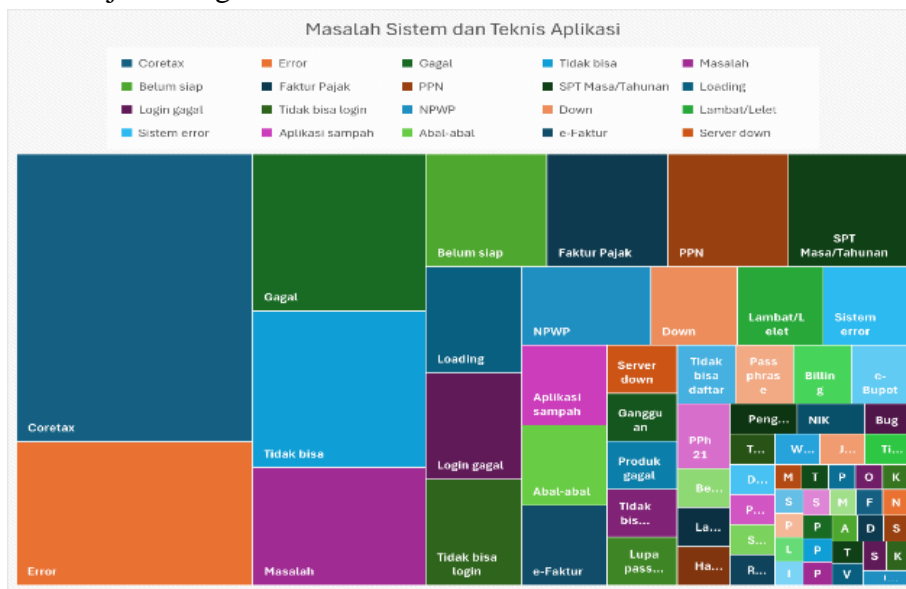


Gambar 1. Views, Comment, Like Video

Dari grafik ini, terlihat bahwa kanal "Info Pajak" mendominasi dengan jumlah tampilan dan komentar yang sangat tinggi, terutama pada video dengan judul yang berkaitan dengan sistem Coretax. Sementara itu, kanal "Metro TV" menunjukkan lonjakan signifikan dalam

jumlah komentar, meskipun jumlah tampilan dan like tetap berada di kisaran lebih rendah. Kanal lain seperti "CNBC Indonesia" dan "Celebrity Word" menunjukkan jumlah like dan komentar yang jauh lebih rendah, meskipun masih ada variasi dalam jumlah tampilan. Grafik ini memberikan gambaran bahwa meskipun jumlah tampilan video tinggi, keterlibatan melalui like dan komentar tidak selalu berbanding lurus.

Ragam comment (komentar) dari youtube yang di kelompokkan menjadi empat bagian diantaranya masalah sistem dan teknis aplikasi, dampak dan keluhan pengguna, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan DJP, dan Isu anggaran, korupsi dan Proyek.



Gambar 2. Masalah sistem dan teknis aplikasi

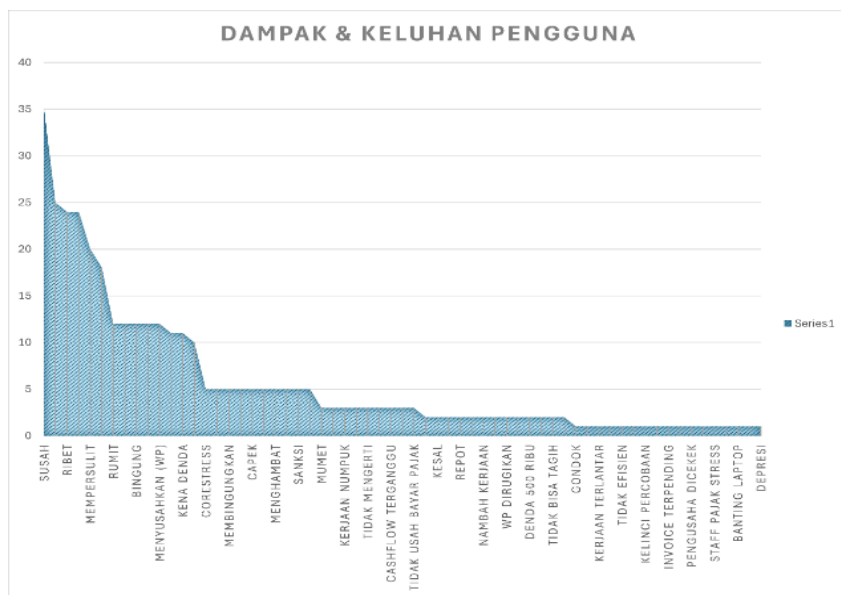
Diagram *treemap* ini menggunakan berbagai warna untuk mengkategorikan masalah yang muncul diantaranya yang paling mencolok yaitu Coretax, masalah umum yang terjadi yang berhubungan dengan aplikasi Coretax itu sendiri, mencakup kesulitan teknis dan

ketidakpastian sistem. Error, gagal, masalah dan tidak bisa nampak menjadi mayoritas pengalaman wajib pajak menggunakan aplikasi Coretax. Sistem *error* menunjukkan masalah teknis yang umum dan menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan lancar termasuk *error* saat

mengakses berbagai fitur. Selain itu gagal, tidak bisa, aplikasi belum siap, sampai pada *server down* menunjukkan keluhan yang cukup besar bagi pengguna sebagai wajib pajak yang mengoperasikan aplikasi yang telah dipublish kepada masyarakat luas.

Faktur pajak, menunjukkan banyak keluhan yang terkait ketidakmampuan aplikasi untuk menghasilkan faktur pajak dengan benar. Gagal Login, menunjukkan kesulitan wajib pajak atau pengguna untuk melakukan login awal termasuk kesalahan password dan autentikasi.

Selanjutnya diagram ini menunjukkan masalah yang lebih spesifik yaitu e-faktur, NPWP, PPh 21, SPT Masa/Tahunan, loading atau gangguan teknis lainnya. Tentunya data ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pengguna dalam menggunakan Coretax yang memerlukan perhatian lebih dalam perbaikan teknis sehingga dilapangan dapat berfungsi dengan baik, efektif dan efisien.



Gambar 3. Dampak & Keluhan Penggunaan

Gambar 3 menunjukkan grafik yang menggambarkan dampak dan keluhan pengguna terhadap aplikasi Coretax. Grafik ini menggunakan *histogram* untuk menunjukkan frekuensi keluhan yang diterima, dengan sumbu horizontal menampilkan berbagai masalah atau keluhan yang dihadapi oleh pengguna, dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah keluhan.

Beberapa keluhan yang paling sering muncul adalah terkait dengan masalah kesulitan diantaranya susah, ribet, dan mempersulit, kondisi tersebut menunjukkan frustrasi besar dari pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Pengguna merasa bahwa aplikasi ini rumit dan bingung, sulit dan menyusahkan wajib pajak (WP) sehingga

mempersulit keadaan wajib pajak mentuntaskan aktivitas perpajakannya.

Keluhan lainnya mencakup masalah dalam membuat faktur pajak, menambah kerjaan, dan masalah terkait dengan kerja yang tidak efisien. Lebih sedikit keluhan seperti *cashflow* terganggu, kerjaan terlantar, dan *invoice* tidak update karena fokus pada aplikasi Coretax, menunjukkan dampak finansial langsung dan proses administrasi yang terganggu bagi pelaku usaha.

Selanjutnya keluhan lainnya menyusahakan WP, kena denda, Corestress, membingungkan, capek, menghambat, sanksi, mumet, kerjaan numpuk, tidak mengerti, Cashflow terganggu, tidak usah bayar pajak, kesal, repot dan lain sebagainya. Umpan balik kekesalan tersebut secara gamblang diungkap pada komentar dan menunjukkan antusiasme sebagai upaya wajib pajak memenuhi administrasi pajaknya menggunakan aplikasi baru namun aplikasi tersebut tidak siap bila digunakan secara serentak di Indonesia.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa masalah teknis dan kesulitan dalam penggunaan aplikasi memiliki dampak yang signifikan bagi pengguna, dengan banyak keluhan yang berfokus pada kesulitan operasional dan ketidaknyamanan dalam sistem Coretax.

Terdapat komentar kritis terhadap pemerintah dan khususnya ke pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan implementasi dan pengelolaan teknologi informasi satu pintu Coretax dalam perpajakan. Dari grafik tersebut yang sering muncul berdasarkan komentar ditujukan terhadap DJP dengan jumlah

lebih dari 30 keluhan, kondisi tersebut menunjukkan rasa ketidakpuasan yang besar terhadap kinerja aplikasi Coretax yang dikelola oleh DJP. Selain itu kritikan ditujukan pada ketidaksiapan sistem ini yang mempengaruhi wajib pajak termasuk masalah teknis yang sering terjadi seperti gagal login, server down dan kesulitan akses.

Selanjutnya ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan tidak efektifnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan aplikasi Coretax. Ada yang menyampaikan juga tentang proses yang tidak transparan dan anggaran yang tidak jelas yang mengarah pada kecurigaan mengenai pengelolaan anggaran selama proyek ini dibangun.

Dari kondisi ketidakpercayaan publik dengan aplikasi Coretax menunjukkan terdapat gap dalam penerimaan publik terhadap digitalisasi sistem perpajakan yang seharusnya dapat lebih dimudahkan dengan penjelasan yang lebih komunikatif dan lebih inklusif. Selain itu ketidakjelasan pengelolaan anggaran proyek Coretax yang menimbulkan kecurigaan potensi pemborosan dan ketidaktransparanan dalam pengadaan sistem.

Grafik yang ditampilkan (gambar 4) menggambarkan isu anggaran dan korupsi proyek, dengan dua variabel yang berbeda: jumlah keluhan atau permasalahan yang dilaporkan (dalam bentuk batang biru) dan persentase kumulatif yang digambarkan dengan garis oranye. Dari grafik ini, dapat dilihat bahwa sebagian besar masalah terkait dengan proyek berkaitan dengan isu



lebih meskipun frekuensinya lebih rendah dari sebelumnya.

Pada sisi kumulatif, garis oranye menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan berkaitan dengan masalah yang telah teridentifikasi dengan jelas di awal, seperti anggaran dan korupsi, yang mencakup persentase besar dari total keluhan. Grafik ini menyoroti hasil yang signifikan masalah anggaran dan korupsi dalam proyek-proyek tersebut, serta kebutuhan aplikasi Coretax yang mendesak untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan transparansi dalam pengadaan proyek agar dapat meminimalkan masalah. Sehingga secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran jelas bahwa pengelolaan anggaran dan transparansi dalam proyek menjadi isu utama yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

## PEMBAHASAN / DISCUSSION

Implementasi aplikasi Coretax sebagai aplikasi perpajakan yang modern di Indonesia setelah di luncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan mulus. Berbagai tantangan dan kritik yang dihadapi selama proses penerapan aplikasi Coretax mulai dari segi teknis, sosial, ekonomi sampai pada pengelolaan anggaran. Diskusi ini dapat menjadi bahan diskusi bersama dan menjadi trend baru dalam modernisasi perpajakan.

Tujuan dan ambisi besar modernisasi perpajakan Indonesia yang dilakukan secara transparan, efisien dan

akuntabel menjadi tantangan besar untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan melalui digitalisasi satu pintu yang semestinya dapat mempercepat proses pengumpulan pendapatan melalui perpajakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Modernisasi perpajakan ini merupakan langkah krusial menghadapi perkembangan globalisasi khususnya pada era revolusi industri 4.0 yang menuntut negara bergantung pada teknologi untuk mempermudah dan mempercepat layanan publik dan memperkuat sistem perpajakan (Baker & Murphy, 2020b).

Sebelum diungkap sebelumnya bahwa implementasi modernisasi sistem perpajakan masih mengalami banyak kendala baik secara teknis maupun secara sosial dimasyarakat yang telah merugikan berbagai pihak terutama pada pelaku usaha yang berkewajiban dan rutin menggunakan aplikasi perpajakan dalam aktivitas bisnis (Musseng et al., 2023). Sehingga terdapat beban lebih karena aplikasi Coretax belum sepenuhnya matang sehingga terdapat kesenjangan besar antara harapan dan kenyataan yang dihadapi pengguna aplikasi tersebut.

Masalah teknis pada aplikasi Coretax sejak di luncurkan Coretax menghadapi berbagai masalah dan kesalahan pada sistem yang sering muncul yaitu *error*, *bug*, lambat (lemot), *loading*, *server down*, tidak dapat diakses dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan keluhan yang sering disebut oleh pengguna selain itu kesulitan dalam membuat faktur pajak dan melaporkan SPT yang seharusnya menjadi bagian dari proses yang mudah dan otomatis menjadi

kegagalan krusial terutama pengelolaan dan pembuatan faktur pajak (Oleynikov et al., 2024). Selanjutnya kesulitan login termasuk OTP dan lupa password menjadi hambatan awal yang signifikan bagi seluruh pengguna. Kesalahan sistem mengarah pada ketidakmampuan aplikasi untuk diakses dan *downtime* dalam waktu yang cukup sehingga jelas telah menghambat kinerja perusahaan dan kinerja ekonomi terlebih lagi telah berkurangnya pendapatan negara terhadap pajak (Taufiq, 2023). Selanjutnya pelaku usaha merasa terbebani karena perlu menyesuaikan diri dengan sistem baru dengan dan tanpa sosialisasi dan pelatihan yang memadai untuk digunakan secara teknis (Fahira Sulaiman & Adhitia Hadi Priambodo, 2024).

Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur teknis Coretax periode Januari – Maret 2025 belum mampu menangani beban pengguna secara stabil dan andal. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tujuan efisiensi yang diharapkan dari adanya digitalisasi sistem.

Dampak negatif langsung pada wajib pajak dan bisnis berdasarkan masalah teknis dan kesulitan menggunakan Coretax yang tidak hanya menimbulkan rasa stress, marah, kecewa, capek, puyeng (mumet). Kondisi negatif diperparah dengan ketidakmampuan menerbitkan faktur pajak secara tepat waktu yang mengganggu penagihan dan cashflow (Tao Lv et al., 2007). Selain itu kekuatiran dikenakan denda akibat keterlambatan lapor atau bayar yang disebabkan error pada sistem menyebabkan situasi yang paradoks dimana sistem yang seharusnya

meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun justru berpotensi mempersulit dan menghukum wajib pajak karena kegagalan sistem yang dibangun Pemerintah (DJP) itu sendiri.

Dampak sosial publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang timbul oleh penerapan Coretax. Para wajib pajak yang patuh seluruhnya mengikuti aturan DJP untuk menggunakan aplikasi Coretax saat dipublish pada 1 Januari 2025. Namun setelah wajib pajak menggunakan aplikasi tersebut muncullah keluhan yang mengarah pada pemerintah dan dianggap terburu-buru dalam peluncuran aplikasi serta kurangnya sosialisasi dalam penggunaan dan teknis aplikasi tersebut (Sirait et al., 2025).

Transisi aplikasi lama ke baru memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena tidak semua pihak langsung memahami aplikasi dan pandai mengoperasikan aplikasi tersebut (Peled, 2021). Sosialisasi dan komunikasi pemerintah bila dilakukan tidak dengan buru-buru tentunya tidak menimbulkan kegaduhan penerimaan pajak dari aplikasi Coretax (Shishkin, 2024). Jika pengguna tidak diberikan pemahaman yang matang dan tidak diberikan pemahaman yang jelas dan dukungan yang memadai tentunya pengguna aplikasi merasa bingung dan frustrasi yang pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terpengaruh menjadi tidak percaya.

Ketidakpuasan teknis dan operasional meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan DJP (Gambar 4). Komentar ketidakpercayaan, pemerintahan gagal dan kebijakan

merugikan menunjukkan adanya persepsi negatif terhadap kompetensi dan integritas pengelola sistem perpajakan (Li, 2021). Isu anggaran biaya Trilyunan menjadi sorotan utama bila disejajarkan dengan performa aplikasi. Hal ini memicu kecurigaan kuat terhadap korupsi, anggaran tidak jelas vendor yang tidak kompeten, proses pengadaan yang tidak transparan menjadi publik tidak percaya. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah khususnya dalam pengelolaan anggaran dan transparansi menjadi hal yang lumrah dan memperburuk citra dan kinerja dari pemerintah dan DJP dalam situasi ini dan menjadi ancaman serius bagi legitimasi perpajakan dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dimasa depan (Erstiawan & Binawati, 2023; Galle, 2014).

Penyuluhan yang efektif perlu dan terus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik (Fanea-Ivanovici et al., 2019). Penyuluhan tersebut dapat melalui berbagai sumber komunikasi termasuk media sosial, seminar workshop dan pelatihan langsung yang dapat memberikan panduan secara jelas penggunaan aplikasi tersebut (Genest-Grégoire et al., 2024). Selanjutnya perlu kebijakan yang lebih responsif dan adaptif untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi Coretax.

Hasil diskusi ini menjadi urgensi bagi pemerintah dan DJP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, perbaikan teknis secara mendasar (Fundamental) dan komprehensif, kecermatan desain usability serta membangun kepercayaan publik melalui

komunikasi yang transparan dan respons terhadap keluhan masyarakat (Goldin et al., 2022). Rekomendasi yang dihasilkan pada penelitian ini dapat berkontribusi pada perbaikan implementasi aplikasi Coretax agar tujuan modernisasi perpajakan dapat tercapai secara efektif (Turcanu, 2022).

Meskipun sebagian besar pemberitaan media massa online menyoroti berbagai masalah dan dampak negatif implementasi Coretax, terdapat beberapa aspek positif yang dapat diuraikan, terutama berkaitan dengan respons dan tindakan dari pihak pemerintah serta institusi terkait. Secara konsisten, pejabat tinggi seperti Menko Luhut Pandjaitan (Rachman & Alaydus, 2025), Menkeu Sri Mulyani (Purnomo, 2025; Rachman, 2025a; Rachman & Alaydus, 2025), Menko Airlangga Hartarto (Rachman, 2025b), dan pihak DJP secara terbuka mengakui adanya permasalahan pada sistem dan menyatakan komitmen kuat untuk melakukan perbaikan.

Komitmen ini diperkuat dengan tindakan pengawasan langsung, seperti kunjungan dan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pajak oleh para menteri, yang menunjukkan keseriusan penanganan isu di level tertinggi. Di sisi lain, langkah-langkah pragmatis juga diambil, seperti keputusan DPR dan DJP untuk menjalankan Coretax bersama sistem lama serta mengizinkan penggunaan kembali e-faktur desktop, yang dinilai sebagai pendekatan transisional bijaksana untuk mengurangi disrupti (Pramudhiaz & Gunawan, 2025). Selain itu, berfungsinya mekanisme akuntabilitas dan hukum

terlihat dari aktifnya DPR memanggil Dirjen Pajak untuk meminta pertanggungjawaban dan diakuinya penerimaan serta penelaahan laporan dugaan korupsi oleh KPK(Saputra, 2025).

Permintaan maaf dari DJP dan adanya analisis dari pakar IT juga dapat dilihat sebagai upaya transparansi dan pencarian solusi berbasis keahlian, meskipun efektivitas perbaikan itu sendiri masih menjadi sorotan(Puspapertiwi et al., 2025).

### KESIMPULAN / CONCLUSSION

Implementasi awal sistem Coretax pada awal tahun 2025, memiliki tujuan awal yaitu untuk memodernisasi administrasi perpajakan, mengalami kegagalan signifikan dalam memenuhi ekspektasi. Kegagalan ini memicu ketidakpuasan luas di masyarakat, yang disebabkan oleh dominasi masalah teknis, kesulitan penggunaan (usabilitas), dan kesenjangan mencolok antara anggaran besar dengan kualitas aplikasi yang dihasilkan. Kondisi ini berimplikasi serius pada erosi kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah, serta berpotensi menghambat kepatuhan pajak sukarela.

Temuan penelitian ini menyoroti adanya kegagalan dalam manajemen proyek teknologi informasi skala besar, kurangnya kesiapan sistem, serta lemahnya strategi sosialisasi dan manajemen perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan teknis secara mendalam, penyuluhan yang lebih efektif, dan komunikasi yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik

dan mempercepat transisi ke sistem digital.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amberger, H. J., & Kohlhase, S. (2023). International taxation and the organizational form of foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 54(8), 1529–1561. <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00614-1>
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Baker, A., & Murphy, R. (2020a). Modern Monetary Theory and the Changing Role of Tax in Society. *Social Policy and Society*, 19(3), 454–469. <https://doi.org/10.1017/S1474746420000056>
- Baker, A., & Murphy, R. (2020b). Modern Monetary Theory and the Changing Role of Tax in Society. *Social Policy and Society*, 19(3), 454–469. <https://doi.org/10.1017/S1474746420000056>
- Elmortada, A., Mokhlis, C.-E., Mokhlis, A., & Elfezazi, S. (2020). Innovations in HR Management: a Content Analysis Approach. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 182–191. <https://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-14>
- Erstiawan, M., & Binawati, L. (2023). Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula Melalui Hybrid Webinar. *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 125–135. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i2.2705>
- Fahira Sulaiman, S., & Adhitia Hadi Priambodo. (2024). Downtime Data Center: Memahami Penyebab, Dampak, dan Solusi Efektif. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2(02), 67–78. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i02.297>
- Fanea-Ivanovici, M., Muşetescu, R.-C., Pană, M.-C., & Voicu, C. (2019). Fighting Corruption and Enhancing Tax Compliance through Digitization: Achieving Sustainable Development in Romania. *Sustainability*, 11(5), 1480. <https://doi.org/10.3390/su11051480>
- Farras Mufidah, I., & Anisaul Hasanah. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*,

- 6(01), 89–97. <https://doi.org/10.30737/jimek.v6i01.4717>
- Galle, B. D. (2014). Does federal spending “coerce” states? evidence from state budgets. *Northwestern University Law Review*, 108(3), 989–1028. <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2870&context=facpub>
- Genest-Grégoire, A., Robson, J., Schwartz, S., & Dadjo, J. (2024). What Proportion of Tax Returns Could the Canada Revenue Agency Complete? *Canadian Public Policy*, 50(3), 292–310. <https://doi.org/10.3138/cpp.2023-016>
- Goldin, J., Homonoff, T., Javaid, R., & Schafer, B. (2022). Tax filing and take-up: Experimental evidence on tax preparation outreach and benefit claiming. *Journal of Public Economics*, 206, 104550. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104550>
- Hajering, H. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 40814090.
- Hilmar, T., & Sachweh, P. (2022). Poison to the Economy”: (Un-)Taxing the Wealthy in the German Federal Parliament from 1996 to 2016. *Social Justice Research*, 35, 462–489.
- Li, W. (2021). The Role of Trust and Risk in Citizens’ E-Government Services Adoption: A Perspective of the Extended UTAUT Model. *Sustainability*, 13(14), 7671. <https://doi.org/10.3390/su13147671>
- Musseng, A., Hasanuddin, R., & Umar, R. (2023). The Effect of Implementation of the Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance of Free Workers at the Makassar Tax Office. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 393–401. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.177>
- Na, H. J., Kim, Y. H., & Jo, H. J. (2023). The Impact of YouTube on Present and Future Firm Value: Using Unstructured Text Analysis. *Sustainability*, 15(5), 4346. <https://doi.org/10.3390/su15054346>
- Nabila, D. T. Della, Jumaidi, L. T., Lestari, B. A. H., Firmansyah, M., Hadi, Y. F., & Sandya, S. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(6), 89–93.
- Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., Drajat, E. U., Saputra, K. G., & Irawan, A. B. (2024). Analisis Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia. *JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(1), 169–186.
- Oleynikov, A. N., Lykov, Yu. V., & Zabolotnyi, V. I. (2024). Assessment of the localization error of radio-acoustic bug devices by means of acoustic distance measurement. *Radiotekhnika*, 216, 73–80. <https://doi.org/10.30837/rt.2024.1.216.06>
- Peled, Y. (2021). Pre-service teacher’s self-perception of digital literacy: The case of Israel. *Education and Information Technologies*, 26(3), 2879–2896. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10387-x>
- Pramudhiaz, E. I., & Gunawan, H. (2025, February 10). Rapat Hampir 5 Jam, DPR dan Ditjen Pajak Sepakat Pakai Coretax dan Sistem Lama. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2025/02/10/rapat-hampir-5-jam-dpr-dan-ditjen-pajak-sepakat-pakai-coretax-dan-sistem-lama>
- Purnomo, H. (2025, January 25). Sri Mulyani Sambangi Kantor Pajak Cek Pelaksanaan Coretax. *Detik\_Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7747143/sri-mulyani-sambangi-kantor-pajak-cek-pelaksanaan-coretax>
- Puspapertiwi, E. R., Adhi, I. S., & Tim, R. (2025, February 18). Kata Pakar IT Soal Penyebab Sistem Coretax bermasalah dan ganggu perpajakan. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/18/120000765/kata-pakar-it-soal-penyebab-sistem-coretax-bermasalah-dan-ganggu-perpajakan?page=all>
- Rachman, A. (2025a, January 24). Sri Mulyani Turun Gunung, Cek Coretax di Kantor Pajak. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250211144136-4-609761/sri-mulyani-buka-suara-soal-coretax-kami-akan-perbaiki>
- Rachman, A. (2025b, February 3). Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250203132144-4-607514/coretax-masih-bermasalah-menko-airlangga-cek-langsung-ke-kantor-pajak>
- Rachman, A., & Alaydus, H. (2025, January 10). Wajib Pajak Komplain Coretax Down Terus, Begini Komentar Luhut. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250110080726-4-602120/wajib-pajak->

- komplain-coretax-down-terus-begini-komentar-luhut
- Rahmayanti, P. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10). <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i10.p16>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital: Tantangan, Inovasi dan Kebijakan Adaptif. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340–348.
- Robiatul Muvidah, A., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1776>
- Saputra, D. (2025, February 16). KPK Akui Terima Laporan Dugaan Korupsi Soal Coretax. *Bisnis Indonesia*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250216/16/1839988/kpk-akui-terima-laporan-dugaan-korupsi-soal-coretax>
- Shishkin, D. S. (2024). The Evolution of Perspectives on the role of Digitalisation in the Development of Labour Relations and Human Resources Policy. *Scientific Research of Faculty of Economics. Electronic Journal*, 16(1), 80–103. <https://doi.org/10.38050/2078-3809-2024-16-1-80-103>
- Sirait, R. J., Ulfah, U., & Wulandari, E. T. (2025). Perancangan Sistem Informasi Pengaduan dan Administrasi Divisi PABX pada PT Gajah Tunggal Tbk. *SisInfo*, 7(1), 62–72. <https://doi.org/10.37278/sisinfo.v7i1.1104>
- Spiegel, A. D., Bleeker, T. I., & Bortoluzzi, S. G. (1955). Evaluating Short Health Training Courses through Content Analysis. *Public Health Reports (1896-1970)*, 70(1), 75. <https://doi.org/10.2307/4589013>
- Tao Lv, Tong Xu, Yang Zhao, Huawei Li, & Xiaowei Li. (2007). Bug analysis and corresponding error models in real designs. *2007 IEEE International High Level Design Validation and Test Workshop*, 59–64. <https://doi.org/10.1109/HLDVT.2007.4392788>
- Taufiq, M. (2023). *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi dan Pendekatan)* (1st ed., Vol. 1). Ananta Vidya.
- Turcanu, I. (2022). Strategies For Improving The Tax Environment Through Institutional Modernization. *Economica*, 2(120), 85–100. <https://doi.org/10.53486/econ.2022.120.085>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.
- Wu, S. (2022). Cultivation mode of new accounting talents in the context of financial and taxation digitalization. *PLOS ONE*, 17(11), e0276005. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276005>